



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERJANJIAN KEAMANAN INDONESIA – AUSTRALIA;
UPAYA INDONESIA UNTUK MENCEGAH GERAKAN
SEPARATISME DI INDONESIA TIMUR**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Mencapai Gelar Magister
Sains (M.Si) dalam Departemen Ilmu Hubungan Internasional**

**M. Fathoni Hakim
0806438622**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : M. Fathoni Hakim

NPM : 0806438622

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Juni 2010

*Man not nature initiates,
But nature in large measure control*

(Sir Halford Mackinder)



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini Pembimbing Tesis menyatakan bahwa:

Nama : M. Fathoni Hakim
NPM : 0806438622
Program : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : PERJANJIAN KEAMANAN INDONESIA – AUSTRALIA;
UPAYA INDONESIA UNTUK MENCEGAH GERAKAN
SEPARATISME DI INDONESIA TIMUR.

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti sidang Tesis. Demikian lembaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2010

Pembimbing



(Edy Prasetyono, Ph.D)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : M. Fathoni Hakim
NPM : 0806438622
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis :

PERJANJIAN KEAMANAN INDONESIA – AUSTRALIA; UPAYA INDONESIA UNTUK MENCEGAH GERAKAN SEPARATIS DI INDONESIA TIMUR

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Science pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Edy Prasetyono, Ph.D. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (.....)

Ketua Sidang : Makmur Keliat, Ph.D (.....)

Sekretaris Sidang : Utaryo Santiko, S.Sos, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.....

Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang merupakan tanggung jawab dalam kewajiban *tholabul 'ilmi*. Tuhan, Allah telah memberikan kesehatan, kekuatan fisik dan pikir untuk menyelesaikannya. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Di dalam usaha penyelesaian tesis ini, penulis telah memperoleh dorongan dan bantuan dari sejumlah pribadi-pribadi dengan caranya masing-masing, baik langsung maupun tidak langsung, telah mempercepat langkah penulisan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan penghargaan kepada pribadi-pribadi termaksud, penulis mempunyai kehendak untuk menyebut beberapa diantara mereka;

Bu Nyai Prof. Dr. Hj. Istibsjaroh, SH, MA, pastilah merupakan pribadi yang amat patut penulis sebut di sini. Doa, bimbingan, semangat, yang di berikan dengan ikhlas telah membuat penulis mempunyai keyakinan untuk menyelesaikan tesis yang bertujuan memperoleh derajat kesarjanaan yang lebih tinggi. Beliau tidak hanya mendorong dengan kata-kata, bahkan melangkah lebih jauh dengan bersedia memberikan semangat serta dukungan doa yang tak pernah padam, di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai wakil rakyat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan lindungan kepada beliau, Amin.

Mas Edy Prasetyono, Ph.D, merupakan pribadi yang telah memberikan bimbingan, masukan dan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau yang begitu padat. Atas semua jerih payahnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih,

Prof. Ikrar Nusa Bhakti, merupakan penguji ahli dalam tesis ini yang senantiasa memberikan masukan dan pencerahan demi kesempurnaan penulisan tesis. Dr. Makmur Keliat, selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Mas Andi Widjajanto, M.Sc, M.S, terima kasih atas bimbingan dan kesediaan memberikan pinjaman buku, serta Mas Utaryo Santiko, S.Sos, M.Si, selaku sekretaris sidang tesis.

Tidak lupa pula penulis haturkan banyak terima kasih kepada Gus Coy (Dr. Effendy Choirie), Drs. Ign. Kristanyo Hardojo, MA, Arif Havas Oegroseno (Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional), dan Kol. Abdurrahman, yang bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau-beliau yang sangat padat untuk melakukan wawancara dengan penulis.

Rasa hormat dan sayang yang tulus dari putramu ini untuk kedua orang tua dengan segenap ketulusan yang sangat besar dan tak terhingga, baik secara moril maupun materiil yang selalu memberikan motivasi dan supportnya kepada putramu ini untuk selalu terus belajar dan menuntut ilmu.

Kepada kawan-kawan angkatan XVI, teman-teman SA-TE, sohib Tribun yang telah menjadi sahabat yang baik dan menjadi motivasi penulis dalam upaya menyelesaikan tugas akhir ini, dan Juga kepada Mbak Iche serta Pak Udin yang selalu siap membantu serta melayani penulis di bidang administrasi

Walaupun telah di sebutkan sejumlah nama yang amat besar bantuannya bagi penyelesaian penulisan tesis ini, namun tanggung jawab atas semua kekeliruan dan kesalahan yang mungkin terdapat di dalam tesis ini, sepenuhnya ada pada diri penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Subhanahuwata'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Besar harapan penulis agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juni 2010

Penulis,

M. Fathoni Hakim

ABSTRAK

Judul Tesis : Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia; Upaya Indonesia untuk mencegah Gerakan Separatisme di Indonesia Timur.
Nama : M. Fathoni Hakim
NPM : 0806438622
Jurusan : Hubungan Internasional.

Tesis ini terdiri dari 34 buku, 6 jurnal, 5 koran, 15 website, 6 naskah dan 4 wawancara

Tesis ini menjelaskan mengenai perjanjian keamanan Indonesia – Australia sebagai upaya Indonesia dalam mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi faktor apa saja yang melatarbelakangi Indonesia dalam melakukan perjanjian keamanan dengan Australia, terkait dengan upaya Indonesia dalam mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur dan keuntungan apa yang diperoleh dari perjanjian keamanan itu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami latar belakang Indonesia melakukan perjanjian keamanan dengan Australia dalam upayanya mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur, serta untuk mengetahui dan memahami keuntungan apa saja yang diperoleh Indonesia dalam melakukan perjanjian keamanan dengan Australia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menjelaskan hubungan tentang karakteristik geografi yang terbuka dengan eskalasi gerakan separatis, sehingga perjanjian keamanan dijadikan langkah skenario terburuk bagi ancaman gerakan separatis di Indonesia timur. Data yang digunakan adalah data sekunder maupun data primer, yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis kualitatif interpretatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor geografi merupakan poin penting dalam politik negara. Konfigurasi geografi Indonesia yang terdiri atas 17.480 pulau dan luas wilayah yang mencapai 7,9 juta km², memiliki garis pantai yang panjangnya mencapai sekitar 81.000 km, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi sangat terbuka dan dapat dimasuki dari segala penjuru. Ketahanan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi semakin kompleks karena luasnya perairan dan menyebarnya wilayah daratan. Karakteristik geografi yang sedemikian rupa sangat rawan akan berbagai ancaman keamanan serta berpotensi terhadap infiltrasi asing.

Pertimbangan kedua dari latar belakang perjanjian keamanan adalah sebagai respon atas perubahan lingkungan strategis di level global, regional dan nasional. Ancaman kejahatan yang muncul dari perubahan lingkungan strategis tersebut adalah penyelundupan senjata, perompakan, terorisme maritim, *people*

smuggling, penyelundupan obat terlarang, yang mana erat kaitannya dengan eskalasi gerakan separatisme dan konflik komunal di Indonesia timur. Dengan adanya perjanjian keamanan ini, kedua negara mempunyai kepentingan nasional yang hendak dicapai. Bagi Indonesia, kepentingan itu adalah kedaulatan dan keamanan, sedangkan bagi Australia kepentingan itu adalah keamanan non-tradisional, seperti teroris dan kejahatan transnasional.

Pertimbangan ketiga latar belakang perjanjian keamanan adalah faktor politik, dimana Australia harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kesatuan NKRI.

Secara umum, perjanjian keamanan Indonesia-Australia ini berisi tentang kerangka kerjasama yang mencakup 21 kerjasama dalam 10 bidang kerjasama, yakni meliputi kerjasama di bidang: pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, kerjasama organisasi multilateral dan membangun kontak dan saling pengertian masyarakat mengenai persoalan-persoalan di bidang keamanan. Sedang implementasi dari kerjasama keamanan tersebut diantaranya adalah pembangunan kapasitas (*capacity building*), operasi bersama, sharing intelijen dan informasi, *joint exercises*, yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia dalam merespon berbagai ancaman yang muncul, termasuk gerakan separatisme dan konflik komunal (*intra-state conflict*).

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi perjanjian keamanan bagi Indonesia adalah *pertama*, sebagai peningkatan kontrol wilayah dan geografi Indonesia yang terbuka, *kedua*, perjanjian keamanan sebagai respon atas ancaman non-tradisional dan *ketiga* perjanjian keamanan sebagai upaya integrasi wilayah dan integrasi politik. Dari ketiga fungsi tersebut, maka perjanjian keamanan Indonesia – Australia merupakan upaya Indonesia dalam mencegah proliferasi gerakan separatisme di Indonesia timur.

ABSTRACT

THE SECURITY AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND AUSTRALIA; INDONESIAN EFFORTS TO PREVENT THE MOVEMENT OF SEPARATISM IN EAST INDONESIA

M. FATHONI HAKIM
0806438622

References: 34 books + 6 journals + 5 newspapers + 15 electronic sources + 6 paper + 4 interview informants

This thesis presents concerning the security agreement between Indonesia – Australia as Indonesian efforts, preventing the movement of separatism in east Indonesia. The discussions in this research covered any factor that formed the background of Indonesia in carrying out the security agreement with Australia, in relation to Indonesian efforts in preventing the movements of separatism in Indonesia east. The aim that wanted to be achieved in this research was to know and understand the Indonesian background carried out the security agreement with Australia towards him prevented the movement of separatism in east Indonesia, as well as to know and understand any profit that was obtained by Indonesia in carrying out the security agreement with Australia.

This research was descriptive analytical, that is to explain relations about the characteristics of geography that was open with the escalation of the movement of the separatist, so as the security agreement was made the step in the worst scenario for the movement threat of the separatist in Indonesia east. The data that was used was the secondary data and the primary data, that was received by using the interview method, the study of the bibliography and the study of the document.

The result of this research emphasizes the application of geography in the practice of states politics. Geographical configuration of Indonesia comprising the 17.480 islands and a vast area thar reaches 7,9 million km², has a long coastline which reaches about 81.000 km, resulted in the Indonesian territory to really was open and could be entered from all directions. Indonesian territory endurance as the archipelagic state became increasingly complex because of the extent of the spread of aquatic and land area.. The characteristics of geography that in such a way was very serious would various security threats as well as potential towards the foreign infiltration.

Second consideration from the background of the security agreement was as the response to the change in the strategic environment in the global, regional and national level. The criminal threat that emerged from the change in this strategic environment was the smuggling of the weapon, piracy, maritime terrorism, people smuggling, the smuggling of medicine was banned, whichever tight his connection with the escalation of the movement of separatism and the

communal conflict in Indonesia east. With the existence of this security agreement, the two countries had the national interests that will be achieved. For Indonesia, the interests were the sovereignty and the security, whereas for Australia the interests were the non-traditional security, like the terrorist and the transnational crime.

Third consideration from the background of the security agreement was politically, Australia has to respect sovereignty and geographic integrity of Indonesia.

Generally, this Indonesia-Australia security agreement contained about the framework of the co-operation that included 21 co-operation in 10 co-operation fields, that is covering the co-operation in the field; the defence, law enforcement, the eradication of terrorism, intelligence, the maritime co-operation, the safety and the security of the flight, the prevention of the expansion of weapons of mass destruction, preceptive the disaster emergency, the multilateral and constructive organisation co-operation contact and the community's mutual understanding concerning problems in the security field. While the implementation from this security co-operation among them was the development of the capacity (capacity building), the operation together, sharing intelligence and information, joint exercises, that all of it that could increase the defence capability and the Indonesian security in responding to various threats that emerged, including the movement of separatism and the communal conflict (intra-state conflict).

Results of this research showed that the function of the security agreement for Indonesia was *first*, as the control of the territory and geography that were open, *second*, the security agreement as the response to the non-traditional threat and the *third*, security agreements as integration efforts of the territory and the integration of politics. From the three functions, then the Indonesian security agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Definisi Konseptual	8
1.5 Kerangka Teori	9
1.5.1 Formasi Konsep	9
1.5.2 Landasan Teori	10
1.6 Hipotesis	19
1.7 Model Analisis	19
1.8 Metodologi Penelitian	20
1.9 Sistematika Pembahasan	22
BAB II: PAPUA, ISU SEPARATISME	
DAN KETERLIBATAN AUSTRALIA	24
2.1 Deskripsi Papua	25
2.1.1 Geografi	25
2.1.2 Demografi	26
2.1.3 Topografi	27
2.2 Gerakan Separatisme Papua Era Orde Baru	27
2.2.1 Organisasi Papua Merdeka (OPM)	28
2.2.2 Pemberontakan OPM	30
2.3 Gerakan Separatisme Papua Era Reformasi	33
2.3.1 Presidium Dewan Papua (PDP)	34
2.4 Eskalasi Gerakan Separatisme Papua	35
2.4.1 Implikasi Migrasi Ilegal terhadap Gerakan Separatis	35
2.4.2 Eskalasi Gerakan Separatis Bersenjata di Papua	37
2.5 Nilai Strategis Papua bagi Australia	39
2.6 Keterlibatan Australia dalam Berbagai Bentuk	41
2.6.1 Keterlibatan Beberapa Senator di Australia	43
2.6.2 Keterlibatan Aktor Non-Negara	44

BAB III: PERJANJIAN KEAMANAN INDONESIA – AUSTRALIA (THE LOMBOK TREATY)	49
3.1 Latar Belakang Perjanjian	49
3.2 Proses Negoisasi	51
3.3 Isi Perjanjian	55
3.4 Ruang Lingkup Kerjasama dan Implementasi	56
3.5 Prinsip Kerjasama	67
BAB IV: PERJANJIAN KEAMANAN INDONESIA – AUSTRALIA; UPAYA INDONESIA UNTUK MENCEGAH GERAKAN SEPARATIS PAPUA	69
4.1 Perjanjian Keamanan sebagai Kontrol Geografi dan Wilayah.....	70
4.2 Perjanjian Keamanan sebagai Respon atas Ancaman Non-tradisional..	82
4.3 Perjanjian Keamanan sebagai Upaya Integritas Wilayah dan Politik ...	90
4.3.1 Perjanjian Keamanan sebagai Upaya Integritas Wilayah	90
4.3.2 Perjanjian Keamanan sebagai Upaya Integritas Politik	93
4.4 Arti Penting Perjanjian Keamanan Bagi Kedua Negara	95
4.4.1 Arti Penting Perjanjian Keamanan Bagi Indonesia	96
4.4.2 Arti Penting Perjanjian Keamanan Bagi Australia	97
BAB V: PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Rekomendasi dan Saran	102
DAFTAR REFERENSI	104
Lampiran 1	Teks <i>Agreement between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation</i> 13 Nopember 2006
Lampiran 2	Teks <i>Implementation Framework for Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons.</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jangkauan Sistem Jaringan Radar Jindalee Bagian dari AMIZ	54
----------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Papua	26
Tabel 2	Perbedaan Karakter Separatisme dengan Konflik Komunal	43
Tabel 3	Grafik Pendatang Ilegal ke Australia Melalui Jalur Laut Tahun 1996-2003	59
Tabel 4	Perbandingan Luas Daratan dan Laut Indonesia	70
Tabel 5	Tipologi Konflik	72
Tabel 6	Persentasi Kesiapan Alutsista TNI AL	75
Tabel 7	Perhitungan Jumlah Kekuatan KRI yang Dibutuhkan Indonesia	76
Tabel 8	Perbandingan Jumlah Pesawat Fighter Indonesia – Singapura	77
Tabel 9	Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara Asia Pasifik	78
Tabel 10	Data Kasus Penyelundupan Senjata Ringan di Indonesia Tahun 2006 – 2009	83
Tabel 11	Angka Tindakan Perompakan di Perairan Indonesia dan Dunia	85
Tabel 12	Peningkatan Jumlah Migrasi Ilegal di Indonesia Tahun 2000 – 2001	88
Tabel 13	Daftar Pengeboman di Indonesia selama 10 tahun terakhir	98